

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Pengujian dan Pembahasan

#### 1. Uji Stasioneritas Data

Pada penelitian ini tahap pertama dalam estimasi data adalah uji stasioner data menggunakan uji akar unit (*unit root test*).

**Tabel 12. Hasil Uji Akar Unit ( *In Level* )**

Variabel Penelitian	t-statistik ADF	Nilai Kritis MacKinnon 5%	Probabilitas	Keterangan
LNKP	-0.382342	-3.081002	0.8892	Tidak Stasioner
LNP	-4.536133	-3.081002	0.0035	Stasioner
LNPP	-4,209187	-3.081002	0.0063	Stasioner
LNUP	-0.559537	-3.081002	0.9828	Tidak Stasioner
INF	-3.333929	-3.081002	0.0317	Tidak Stasioner
LNT	-3.267490	-3.081002	0.0358	Tidak Stasioner
LNHM	-1.809299	-3.081002	0.3620	Tidak Stasioner

*Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 7 (Lampiran)*

Pada tabel diatas dapat dilihat perilaku data dari masing-masing variabel.

Berdasarkan hasil pengujian *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* pada tingkat level yang mencakup *intercept*, dapat dilihat bahwa tidak semua variabel pada tingkat ini nilai absolut ADF nya lebih kecil dari nilai kritis McKinnon dengan derajat keyakinan 5%. Diketahui bahwa hanya variabel bebas Penerimaan negara (LNPN) dan Pengeluaran Pemerintah (LNPP) mempunyai kondisi data stasioner pada tingkat level yang artinya variabel tersebut sudah tidak mengandung masalah

akar unit. Sampai pada tahap ini, untuk variabel lain belum dapat dikatakan stasioner pada derajat yang sama yaitu pada tingkat level dikarenakan nilai ADF dari variabel tersebut lebih besar dari nilai kritis McKinnon ditingkat 5%. Sehingga, perlu dilakukan uji derajat integrasi atau uji stasioneritas pada derajat *difference* sampai semua variabel yang diamati stasioner pada derajat yang sama.

**Tabel 13. Hasil Uji Derajat Integrasi (*First Difference*)**

Variabel	t-statistik ADF	Nilai Kritis MacKinnon 5%	Probabilitas	Keterangan
D(LNKP)	-4.802998	-1.966270	0.0001	Stasioner
D(LNPN)	-6.333045	-1.966270	0.0000	Stasioner
D(LNPP)	-6.303886	-1.966270	0.0001	Stasioner
D(LNUP)	-4.854890	-1.966270	0.0001	Stasioner
D(INF)	-17.01230	-1.966270	0.0004	Stasioner
D(LNNT)	-4.134466	-1.966270	0.0012	Stasioner
D(LNHM)	-3.673655	-1.966270	0.0000	Stasioner

Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 7 (Lampiran)

Pada tabel diatas menunjukkan hasil uji statistik ADF pada *first difference* yang menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, dengan kata lain data pada variabel Keseimbangan primer (LNKP), Penerimaan negara (LNPN), Pengeluaran pemerintah (LNPP), Utang pemerintah (LNUP), Inflasi (INF), Nilai tukar (LNNT), dan Harga minyak dunia (LNHM) setelah diturunkan satu kali data menjadi stasioner. Dengan nilai absolut ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon pada tingkat keyakinan 5%. Artinya semua variabel tersebut sudah tidak mengandung masalah akar unit dan mempunyai kondisi data stasioner pada tingkat *first difference* atau derajat integrasi satu.

## 2. Uji Kointegrasi

Untuk pengujian kointegrasi antara Penerimaan negara (LNPN), Pengeluaran pemerintah (LNPP), Utang pemerintah (LNUP), Inflasi (INF), Nilai tukar (LNNT), dan Harga minyak dunia (LNHM) terhadap Keseimbangan primer (LNKP) digunakan pengujian kointegrasi dengan pendekatan metode *Engle-Granger*. Dan hasil dengan metode tersebut ditunjukkan sebagai berikut :

**Tabel 14. Hasil Uji Kointegrasi**

Persamaan	t-statistik ADF	Nilai Kritis MacKinnon 5%	Probabilitas	Keterangan
RESIDUAL	-3.762471	-3.081002	0.0144	Terkointegrasi

*Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 7 (Lampiran)*

Pengujian stasioneritas pada residual model persamaan jangka panjang diatas melalui metode *Augmented Dickey-Fuller Test*. Pada tabel diatas menunjukkan hasil uji *Eagle Granger* dengan nilai ADF-test yang dihasilkan sebesar -3.76241. Dan nilai kritis dengan tingkat kepercayaan 5% menghasilkan keputusan menolak  $H_0$  (  $|ADF\text{-test}| > |t\text{-tabel}|$  ) atau dapat dilihat juga melalui nilai prbabilitas yang kurang dari taraf signifikansi 5% (Prob = 0,0144 < 0,05). Dengan kata lain, artinya residual dari persamaan telah stasioner pada derajat integrasi nol atau tingkat level. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan (berkointegrasi) dalam jangka panjang antara keseimbangan primer (LNKP) dan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu penerimaan negara (LNPN), pengeluaran pemerintah (LNPP), utang pemerintah (LNUP), inflasi (INF), nilai tukar (LNNT), dan harga minyak dunia (LNHM).

### 3. Hasil Pengujian Regresi

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis analisis model penelitian yaitu model dalam jangka pendek dan model dalam jangka panjang yang disajikan dalam rangkuman hasil regresi pada tabel berikut :

**Tabel 15. Rangkuman Hasil Regresi**

**Variabel Terikat : LNKP ( Keseimbangan Primer)**

Variabel	Model I	Model II
	Koefisien (t-statistik)	
C	-0.419778 (-0.878087)	-379,7976 (-3,905128)
D(LNPN)	49.15443 (3.736437)*	
LNPN		54,35090 (4,240751)*
D(LNPP)	-44.64980 (-3.625017)*	
LNPP		-50,19296 (-4,046569)*
D(LNUP)	-2.872431 (-0.356423)	
LNUP		-9.629205 (-2,544640)*
D(INF)	-0.071113 (-0.976675)	
INF		-0.121248 (-3,465343)*
D(LNNT)	2.252852 (0.304693)	
LNNT		9,243480 (2,414998)*
D(LNHM)	-4.656268 (-1.809734)**	
LNHM		-5,604913 (-2,915422)*
ECT	-1.223538 (-3.503326)	
R-squared	0,833765	0,891978
Adj. R-squared	0,688310	0,827165
F-statistik	5,732097	13,76230
Prob. (F-statistik)	0,001256	0,000256
DW. Statistik	2,611590	2,367140

Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 7 (Lampiran)

Keterangan :

Model I : Error Correction Model.

Model II : Regresi Berganda menggunakan Ordinary Least Square.

(t-Statistik)\* : Signifikan pada tingkat keyakinan 5%.

(t-Statistik)\*\* : Signifikan pada tingkat kepercayaan 10%.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dua model penelitian, dimana model I merupakan hasil estimasi menggunakan pengujian *Error Correction Model* yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang dengan menambah *Error Correction Term* (ECT) pada periode lag 1 dan memasukkan penyesuaian (D) untuk melakukan koreksi ketidakseimbangan tersebut. Apabila koefisien ECT signifikan secara statistik, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian adalah valid. Model ECM akan mengoreksi periode berikutnya jika dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode.

Dalam tabel menunjukkan hasil pengujian estimasi ECM, diketahui bahwa secara statistik koefisien ECT signifikan dengan probabilitas 0,0080 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ , berarti tingkat kesalahan dalam keseimbangan jangka pendek dapat dikatakan mempengaruhi keseimbangan primer. Nilai koefisien ECT menunjukkan angka 1,223538 yang bertanda negatif artinya keseimbangan primer menunjukkan adanya penyesuaian terhadap ketidakstabilan yang terjadi di dalam jangka pendek. Koefisien regresi ECT (-1) adalah  $(\lambda)$ , sehingga *speed of adjustment* adalah  $1 - \lambda$  sebesar  $1 - 0,223538$  ( $1 - 0,223538$ ). Jika diubah dalam persen maka sebesar 22,23% yang mengartikan bahwa pada periode pertama proses penyesuaian masih mencapai 22,23% sehingga waktu proses penyesuaian dalam keseimbangan secara keseluruhan membutuhkan waktu selama 1 tahun. Dan perbedaan antar nilai aktual keseimbangan primer dengan nilai keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang sebesar 1,223538 akan disesuaikan dalam waktu 1 tahun. Dalam hal ini model ECM dinyatakan sah atau valid dalam penelitian. Secara

statistik dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan jangka pendek antara variabel bebas terhadap keseimbangan primer.

Hasil regresi dalam persamaan jangka pendek menghasilkan nilai  $R^2$  sebesar 0,833765, sehingga hal ini mengartikan bahwa dalam persamaan jangka pendek variabel penerimaan negara D(LNPN), pengeluaran pemerintah D(LNPP) utang pemerintah D(LNUP), inflasi D(INF), nilai tukar D(LNNT), harga minyak dunia D(LNHM), dan *error correction term* (ECT) mempengaruhi variabel keseimbangan primer D(LNKP) sebesar 83,37% sementara sisanya sebesar 26,63% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Sedangkan Model II menunjukkan hasil estimasi dari regresi berganda dengan menggunakan *Ordinary Least Square*. Konstanta sebesar -379,7976 mengartikan bahwa adanya pengaruh variabel bebas ekonomi penerimaan negara, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak dunia.

Keseimbangan primer akan mengalami perubahan sebesar 379,7976 persen.

Berdasarkan tabel tersebut, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam setiap persamaan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $R^2$  yang tinggi. Pada model persamaan jangka panjang, nilai  $R^2$  yang didapat dari hasil regresi diketahui sebesar 0,891978. Hal ini mengartikan bahwa variabel pendapatan nasional (LNPN), pengeluaran pemerintah (LNPP), utang pemerintah (LNUP), inflasi (INF), nilai tukar (LNNT), dan harga minyak dunia (LNHM) mempengaruhi variabel keseimbangan primer (LNKP) sebesar 89,19% sementara sisanya sebesar 19,81% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini digunakan pengujian asumsi klasik pada setiap persamaan yang digunakan agar model tersebut dapat dipastikan memiliki parameter yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sehingga penelitian ini tidak hanya melihat keseimbangan dalam jangka panjang saja, tetapi melihat pada keseimbangan jangka pendeknya juga. Secara keseluruhan, hasil uji asumsi klasik tersebut menunjukkan bahwa keempat persamaan dalam asumsi klasik diharapkan memiliki parameter yang BLUE.

##### 4.1. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya. Model persamaan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas sempurna sehingga koefisien variabel bebas dan *standard error* dapat diestimasi, dengan mempertimbangkan multikolinearitas tidak merusak asumsi regresi (Blanchard dalam Gujarati, 2006). Pengujian yang dilakukan adalah berdasarkan kriteria *Variance Inflation Factor* (VIF) dimana jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka variabel penjelas terindikasi adanya multikolinearitas. Variabel bebas dikatakan saling berhubungan erat dengan variabel bebas lainnya jika memiliki nilai VIF lebih dari 10. Pada penelitian hasil uji multikolinearitas dalam persamaan jangka panjang terjadi pada variabel penerimaan negara, pengeluaran pemerintah, dan utang pemerintah dengan nilai VIF secara berurutan adalah 23,33 ; 22,23 ; dan 28,18. Namun dalam persamaan jangka pendek variabel bebas yang terjadi multikolinearitas adalah penerimaan

negara, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, dan inflasi karena masing-masing memiliki nilai VIF lebih dari 10. Salah satu cara dalam mengatasi permasalahan multikolinearitas adalah data pada variabel dibiarkan saja dengan mempertimbangkan tidak merusak asumsi regresi (Blanchard dalam Gujarati, 2006).

#### 4.2. Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas digunakan Uji *White*. Berdasarkan hasil *White-Test* didapatkan probabilitas *chi-square* dari  $Obs \cdot R\text{-squared}$  pada persamaan jangka panjang yaitu sebesar 0,4023 atau lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Sehingga data yang dihasilkan pada model persamaan jangka panjang ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Dan kemudian pada model persamaan jangka pendek, probabilitas *chi-square* dari  $Obs \cdot R\text{-square}$  adalah sebesar 0,1948 atau lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian model persamaan dalam jangka pendek pun tidak mengandung heteroskedastisitas.

#### 4.3. Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan metode *Breusch-Godfrey* dan sering dikenal dengan nama metode *Lagrange Multiplier* (LM). Berdasarkan hasil pengujian *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* didapatkan nilai  $Obs \cdot R\text{-squared}$  pada persamaan jangka panjang yaitu sebesar 2,9293. Kemudian dibandingkan dengan nilai  $F^2$  tabel pada  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan  $df = (n-k) = 17-6 = 11$  maka diperoleh nilai 17,2750. Karena  $F^2$  hitung  $< F^2$  tabel ( $2,9293 <$

17,2750) atau nilai probabilitas *chi-square* dari *Obs\*R-squared* yaitu sebesar 0.2312 atau lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Sehingga data yang dihasilkan pada model persamaan jangka panjang ini tidak terdapat autokorelasi.

Dan kemudian pada model persamaan jangka pendek, dengan derajat kebebasan =  $(n-k = 16-7) = 10$  maka diperoleh nilai 14,6836. Probabilitas *chi-square* dari *Obs\*R-square* adalah sebesar 0.0501 atau lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  ( $10.5700 < 14,6836$ ) Dengan demikian model persamaan dalam jangka pendek pun tidak terdapat autokorelasi juga.

#### 4.4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sudah menyebar secara normal dan mengetahui kenormalan *error term* dari variabel bebas maupun terikat. Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini menggunakan metode *Jarque-Bera Test (J-B Test)*. Dari hasil *Jarque-Bera Test (J-B Test)* pada model persamaan jangka panjang diperoleh nilai JB sebesar 0,7283. Kemudian dibandingkan dengan nilai  $\chi^2$  tabel pada  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan = 11 maka diperoleh nilai 17,2750. Karena nilai JB lebih kecil daripada  $\chi^2$  tabel maka residual mempunyai distribusi normal. Dan nilai probabilitas JB yaitu sebesar 0,6947 atau lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Sehingga data *residual* yang dihasilkan pada model persamaan jangka panjang ini terdistribusi normal.

Dan kemudian pada model persamaan jangka pendek, probabilitas JB adalah sebesar 0,9400 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau nilai JB sebesar 0,1237 lebih kecil

daripada  $t^2$  tabel. Dengan demikian model persamaan dalam jangka pendek pun data *residual* berdistribusi normal.

## **5. Pengujian Hipotesis**

### **5.1. Uji t-Statistik**

Uji t-stat dilakukan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas pada setiap koefisien regresinya.

Dalam penelitian ini, uji t dilakukan dengan uji t satu arah. Dengan nilai kritis yang digunakan adalah  $\alpha = 5\%$ . Pada model persamaan jangka panjang, derajat kebebasan yang digunakan adalah  $Df = n-k-1$  ( $Df = 17-6-1 = 10$ ) dengan nilai t tabel yang didapat dengan derajat kebebasan 10 sebesar 1,8331. Dan pada model persamaan jangka pendek dengan kebebasan yang digunakan adalah  $Df = n-k-1$  ( $Df = 16-7-1 = 8$ ) diperoleh nilai t tabel sebesar 1,8595. Dengan membandingkan nilai t-statistik dan t-tabel, maka variabel yang berpengaruh pada setiap persamaan jangka pendek maupun jangka panjang yaitu sebagai berikut :

#### **5.1.1. Pengaruh Penerimaan Negara dengan Keseimbangan Primer**

Hipotesis awal menunjukkan bahwa penerimaan negara berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Dan hipotesis awal ini sesuai dengan hasil hipotesis penelitian dengan pengujian variabel penerimaan negara secara parsial terhadap keseimbangan primer, dalam estimasi jangka pendek diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,7364 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,0057. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel

dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar  $(3,7364) > t\text{-tabel } (1,8595)$  pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  ditolak yang artinya penerimaan negara secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan primer pada tahun 1998 hingga 2014 dengan tingkat kesalahan 5% dalam persamaan jangka pendek.

Dan dalam jangka panjang pengujian variabel penerimaan negara secara parsial terhadap keseimbangan primer, diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,2407 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,0017. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar  $(4,2407) > t\text{-tabel } (1,8331)$  pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  ditolak yang artinya penerimaan negara secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan primer pada tahun 1998 hingga 2014 dengan tingkat kesalahan 5% dalam persamaan jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dalam jangka pendek penerimaan negara secara statistik terbukti berpengaruh positif terhadap keseimbangan primer dengan memiliki nilai koefisien D(LNPN) yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 49,1544. Hal ini sesuai dengan hipotesis, pengaruh yang positif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari penerimaan negara akan menaikkan surplus keseimbangan primer sebesar 49,15% atau dengan kata lain akan menurunkan defisit keseimbangan primer sebesar 49,15% dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang elastis, dengan kenaikan pada penerimaan negara dalam jangka pendek akan mengakibatkan meningkatnya keseimbangan primer dalam jangka pendek.

Penerimaan negara berasal dari dua sumber yaitu salah satunya adalah berasal dari pajak. Dengan semakin besarnya penerimaan dari sektor pajak maka akan semakin besar untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek.

Penerimaan negara yang terus meningkat secara perlahan dengan diiringi pengurangan belanja negara akan mempengaruhi besarnya keseimbangan primer.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sriyana (2007) dimana penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak dalam jangka pendek belum sepenuhnya dapat menekan defisit APBN karena penerimaan dari sektor pajak masih sangat minim.

Dalam jangka panjang dengan efektivitas pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, akan merangsang perekonomian lebih baik. Penerimaan negara yang terus meningkat sepanjang tahun akan mempengaruhi keseimbangan primer tumbuh. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa dalam jangka panjang penerimaan negara secara statistik terbukti berpengaruh positif terhadap keseimbangan primer dengan memiliki nilai koefisien LNPN yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 54,35. Hal ini sesuai dengan hipotesis, pengaruh yang positif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari penerimaan negara akan menaikkan surplus keseimbangan primer sebesar 54,35% atau dengan kata lain akan menurunkan defisit keseimbangan primer dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang elastis juga, dengan kenaikan pada penerimaan negara dalam jangka panjang akan mengakibatkan meningkatnya surplus keseimbangan primer dalam jangka panjang.

Penjelasan ini didukung dalam studi yang dilakukan oleh LP2FE UGM (2004) yang menerangkan bahwa penerimaan negara dari penjualan aset yang merupakan simulasi manajemen utang luar negeri merupakan faktor utama dalam meningkatkan keseimbangan primer. Penerimaan negara yang kian meningkat terjadi karena adanya kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik lagi.

### **5.1.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dengan Keseimbangan Primer**

Hipotesis awal menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan hipotesis awal ini sesuai dengan hasil hipotesis penelitian dengan pengujian variabel pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap keseimbangan primer, diperoleh nilai t-hitung sebesar -3,6250 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,0067. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar  $(-3,6250) < t\text{-tabel } (-1,8595)$  pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  ditolak yang artinya pengeluaran pemerintah secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer pada tahun 1998 hingga 2014 dengan tingkat kesalahan 5% dalam persamaan jangka pendek.

Dan dalam jangka panjang pengujian variabel pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap keseimbangan primer, diperoleh nilai t-hitung sebesar -4,0465 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,0023. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung

sebesar  $(-4,0465) < t\text{-tabel } (-1,8331)$  pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  ditolak yang artinya pengeluaran pemerintah secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer dalam persamaan jangka panjang.

Pengeluaran pemerintah setiap tahun terus mengalami peningkatan, keadaan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh WW. Rostow dan RA. Musgrave perkembangan pengeluaran pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Dari hasil penelitian dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah secara statistik terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer dengan memiliki nilai koefisien  $D(LNPP)$  yang menunjukkan hasil signifikan sebesar  $-44,65$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis, pengaruh yang negatif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari pengeluaran pemerintah akan menurunkan surplus keseimbangan primer sebesar 44,65% atau dengan kata lain akan menaikkan defisit keseimbangan primer dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang inelastis, dengan perubahan kenaikan pada pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan perubahan total dengan penurunan pada keseimbangan primer yang relatif lebih besar dalam jangka pendek. Ketika dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan dapat menyebabkan keseimbangan primer menurun sepanjangnya waktu, dengan arti pemerintah membutuhkan dana tambahan lain untuk menekan keseimbangan primer agar tidak mengalami defisit.

Dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah menjadi indikator yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, sebab dalam jangka panjang ketika pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan dengan tidak diimbangi penerimaan

negara yang meningkat pula akan menyebabkan defisit keseimbangan primer semakin memburuk dan terus mengalami defisit. Defisit keseimbangan primer tersebut akan meningkatkan utang pemerintah semakin banyak karena pemerintah harus menutupi kekurangan dengan utang baru, sehingga kesinambungan fiskal mengalami kondisi yang tidak baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan benar. Dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah secara statistik terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer dengan memiliki nilai koefisien LNPP yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 50,19. Dengan pengaruh yang negatif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari pengeluaran pemerintah akan menurunkan surplus keseimbangan primer sebesar 50,19% atau dengan kata lain akan menaikkan defisit keseimbangan primer dalam jangka panjang dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang inelastis, dengan perubahan kecil dalam jangka panjang pada pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan perubahan yang begitu besar dengan penurunan pada surplus keseimbangan primer.

Selama ini pemerintah melakukan kebijakan stimulus fiskal, berupa defisit anggaran. Dimana, kondisi ini memperlihatkan sisi pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi dapat terdorong.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Barsky, et. Al (1986) ekonom Klasik/Neo Klasik menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari utang luar negeri akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi dalam

jangka panjang tidak akan mempunyai dampak yang signifikan akibat adanya *crowding-out*, yaitu keadaan dimana terjadi *overhead* dalam perekonomian yang menyebabkan investasi swasta berkurang dan pada akhirnya akan menurunkan produk domestik bruto.

Tetapi jika hal ini terus berlangsung akan tidak baik juga untuk APBN karena keseimbangan primer akan semakin defisit sedangkan pengeluaran yang semakin besar tidak terkendali, akibatnya pemerintah harus mencari dana lebih yang berasal dari utang untuk membiayai dan perekonomian pun terganggu karena kesinambungan fiskal tidak dalam keadaan baik

### **5.1.3. Pengaruh Utang Pemerintah dengan Keseimbangan Primer**

Hipotesis awal menunjukkan bahwa utang pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan hipotesis awal ini tidak sesuai dengan hasil hipotesis penelitian karena dalam jangka pendek dengan diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,3564 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,7307. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar (-0,3564) > t-tabel (-1,8595) pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  diterima yang artinya utang pemerintah secara statistik tidak signifikan terhadap keseimbangan primer pada tahun 1998 hingga 2014 dalam persamaan jangka pendek.

Sedangkan dalam persamaan jangka panjang pengujian variabel utang pemerintah secara parsial terhadap keseimbangan primer, diperoleh nilai t-hitung sebesar -2,5446 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,0291. Berdasarkan

perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar  $(-2,5446) < t\text{-tabel } (-1,8331)$  pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  ditolak yang artinya utang pemerintah secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer pada tahun 1998 hingga 2014 dengan tingkat kesalahan 5% dalam persamaan jangka panjang.

Hasil penelitian dalam jangka pendek utang pemerintah secara statistik terbukti tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keseimbangan primer. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis, dimana dalam hipotesis utang pemerintah berpengaruh negatif terhadap keseimbangan primer.

Penjelasan ini didukung dengan hasil temuan penelitian Makhilani (2007), yang menjelaskan bahwa hasil dalam jangka pendek tidak signifikan, dikarenakan pada umumnya jenis pinjaman utang di Indonesia bersifat jangka panjang, dan besarnya defisit tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu lama. Maka dari itu utang pemerintah dalam jangka pendek tidak mempengaruhi besarnya keseimbangan primer.

Dalam jangka panjang utang pemerintah mempengaruhi keseimbangan primer, karena jenis pinjaman yang dilakukan negara Indonesia adalah utang yang pembayarannya memiliki tenggang waktu yang relatif lama. Dari hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan benar. Dalam jangka panjang utang pemerintah secara statistik terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer dengan memiliki nilai koefisien LNUP yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 9,63%. Dengan pengaruh yang negatif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari utang pemerintah akan

menurunkan surplus keseimbangan primer sebesar 9,63% atau dengan kata lain akan menaikkan defisit keseimbangan primer sebesar 9,63% dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang inelastis, dengan perubahan kenaikan pada utang pemerintah akan mengakibatkan perubahan yang begitu besar dengan penurunan pada keseimbangan primer.

Menurut Cuddington (1996) dalam PPE FE UGM, menerangkan bahwa aliran surplus primer merupakan fondasi utama bagi ketahanan fiskal pemerintah terhadap utang. Posisi utang pemerintah yang semakin meningkat dan memprihatinkan setiap tahunnya, menjadi masalah bagi pemerintah. Proporsi pembayaran utang yang begitu besar dalam APBN menjadi beban tersendiri bagi keuangan negara terlebih lagi efektivitas utang masih belum jelas.

Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Makhilani (2007) mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang pemerintah harus membayar pinjaman untuk pembiayaan belanja yang lebih besar dari penerimaannya.. Untuk menutupi bunga utang yang muncul, pemerintah harus melakukan pembayarannya dengan pinjaman utang baru dan itu belum cukup dan memenuhi besarnya pinjaman utang yang lama.

Akibatnya dengan besarnya utang yang dilakukan pemerintah akan memperburuk keadaan kesinambungan fiskal. Seperti yang dikemukakan oleh Hussin Abdullah dkk (2012) dalam penelitiannya tentang *An Empirical Study On Fiscal Sustainability In Malaysia* menjelaskan bahwa Pencapaian makroekonomi dalam GDP berkesinambungan dengan surplus primer yang secara perlahan dan berangsur dalam mencapai *sustainable* memiliki kesinambungan fiskal yang baik

dengan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan utang luar negeri dengan membatasi anggaran pengeluaran tidak melebihi penerimaan yang ada.

#### **5.1.4. Pengaruh Inflasi dengan Keseimbangan Primer**

Hipotesis awal menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan hipotesis awal ini tidak sesuai dengan hasil hipotesis penelitian karena dalam jangka pendek diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,9766 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,3573. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar (-0,9766) > t-tabel (-1,8595) pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  diterima yang artinya inflasi secara statistik tidak signifikan terhadap keseimbangan primer .

Sedangkan dalam persamaan jangka panjang pengujian variabel inflasi secara parsial terhadap keseimbangan primer, diperoleh nilai t-hitung sebesar -3,4653 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,0061. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar (-3,4653) < t-tabel (-1,8331) pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  ditolak yang artinya inflasi secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer pada tahun 1998 hingga 2014 dengan tingkat kesalahan 5%.

Hasil penelitian dalam jangka pendek menerangkan bahwa inflasi secara statistik terbukti tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keseimbangan primer. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis, dimana dalam hipotesis inflasi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer. Kebijakan moneter biasanya lebih efektif untuk mengatasi masalah inflasi daripada untuk mendorong ekspansi kegiatan ekonomi pada jangka pendek. Hal tersebut disebabkan inflasi dapat diatasi dengan mengendalikan permintaan total masyarakat melalui pengurangan jumlah uang beredar. Dalam jangka pendek hasil pengujian menyatakan tidak signifikan terhadap keseimbangan primer.

Dikarenakan Inflasi dikendalikan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia atau otoritas moneter, pengendalian inflasi ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena perlu adanya pengawasan langsung yang membutuhkan waktu lama dan biaya. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia atas inflasi sangat terbatas, karena inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai jasa otoritas moneter selalu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan perekonomian, khususnya terhadap kemungkinan tekanan inflasi. Selanjutnya respon kebijakan moneter didasarkan kepada hasil penyesuaian tersebut.

Sedangkan dalam temuan penelitian yang dilakukan Adji (1996) tentang analisis pembiayaan defisit anggaran periode tahun 1974-1989 menerangkan kebijakan defisit APBN yang diambil pemerintah pada tahun penelitian tidak akan berpengaruh terhadap inflasi pada tahun itu juga, tetapi pengaruhnya akan terlihat beberapa tahun kedepan atau dalam jangka panjang. Maka dari itu inflasi dalam jangka pendek tidak mempengaruhi besarnya keseimbangan primer.

Pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan moneter, melainkan juga menggunakan kebijakan ekonomi

makro lainnya seperti kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor riil. Adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga lintas sektoral sangat penting untuk dilakukan dalam mengendalikan masalah inflasi ini.

Dalam jangka panjang inflasi akan mengakibatkan tidak efisiennya penggunaan keuangan negara dengan terjadinya defisit pada keseimbangan primer. Terjadinya inflasi memunculkan adanya kenaikan harga-harga dimana biaya pembangunan program juga akan meningkat sedangkan anggaran masih tetap sama. Hal ini mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas program sehingga untuk memaksimalkan program tersebut anggaran negara perlu direvisi. Maka, pemerintah dengan terpaksa harus mengeluarkan dana untuk menambah standar harga. Adanya peningkatan dalam pengeluaran yang dilakukan pemerintah akibat inflasi ini akan mengakibatkan keseimbangan primer semakin menurun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan benar. Dalam jangka panjang inflasi secara statistik terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer dengan memiliki nilai koefisien INF yang menunjukkan hasil signifikan sebesar -2,87. Dengan pengaruh yang negatif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari inflasi akan menurunkan surplus keseimbangan primer sebesar 2,87% atau akan dengan kata lain akan menaikkan defisit keseimbangan primer sebesar 2,87% dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang inelastis, dengan perubahan kecil dalam jangka panjang pada inflasi akan mengakibatkan penurunan pada surplus keseimbangan primer yang relatif besar.

### 5.1.5. Pengaruh Nilai Tukar dengan Keseimbangan Primer

Hipotesis awal menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan hipotesis awal ini tidak sesuai dengan hasil hipotesis penelitian karena dalam jangka pendek, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,3046 dengan nilai probabilitas sebesar 0,7684. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar  $(0,3046) < t\text{-tabel } (1,8595)$  pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  diterima yang artinya nilai tukar secara statistik tidak signifikan terhadap keseimbangan primer.

Sedangkan dalam persamaan jangka panjang, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,4149 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,0364. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar  $(2,4149) > t\text{-tabel } (1,8331)$  pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  ditolak yang artinya nilai tukar secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan primer pada tahun 1998 hingga 2014 dengan tingkat kesalahan 5%.

Hasil penelitian dalam jangka pendek menerangkan bahwa nilai tukar secara statistik terbukti tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keseimbangan primer. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis, dimana dalam hipotesis nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan primer. Nilai tukar sangat berkaitan dengan utang luar negeri, sebab dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga utang ke negara lain harus menggunakan nilai kurs sesama negara.

Sedangkan dalam jangka pendek utang tidak berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan primer seperti yang dijelaskan oleh Makhiani (2007), yang menjelaskan bahwa hasil dalam jangka pendek tidak signifikan, dikarenakan pada umumnya jenis pinjaman utang di Indonesia bersifat jangka panjang, dan besarnya defisit tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu lama.

Dalam jangka panjang nilai tukar rupiah terhadap US Dollar dan beberapa mata uang utama dunia akan mempengaruhi utang luar negeri berupa peningkatan jumlah utang dalam mata uang rupiah. Disaat nilai tukar rupiah terdepresiasi sedangkan nilai USD terapresiasi, maka cicilan pokok dan bunga pinjaman yang akan dibayarkan meningkat dan hal ini akan membebani APBN sebab utang luar negeri mengalami peningkatan dan pembayaran cicilan pokok beserta bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah melebihi yang telah dianggarkan sebelumnya. Sehingga pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan utang karena nilai tukar melemah menjadi lebih besar, akibatnya keseimbangan primer akan menurun. Begitu pun sebaliknya ketika nilai tukar rupiah terapresiasi sedangkan nilai USD terdepresiasi, maka cicilan pokok utang yang akan dibayarkan akan menurun karena nilai tukar rupiah menguat dan pada akhirnya mengakibatkan defisit keseimbangan primer meningkat sebab pemerintah tidak mengeluarkan pembiayaan lebih untuk utang luar negeri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan benar. Dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah secara statistik terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer dengan

memiliki nilai koefisien LNNT yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 9,24. Dengan pengaruh yang positif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari nilai tukar akan meningkatkan surplus keseimbangan primer sebesar 9,24% atau dengan kata lain jika nilai tukar terjadi depresiasi maka akan meningkatkan defisit keseimbangan primer sebesar 9,24% dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang elastis, dengan perubahan apresiasi pada nilai tukar akan mengakibatkan perubahan kenaikan pada keseimbangan primer cukup besar dalam jangka waktu yang panjang.

Hasil penelitian ini didukung dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (1996), yang menerangkan bahwa depresiasi rupiah menyebabkan utang luar negeri Indonesia bertambah karena Indonesia membayar utang luar negeri dalam valuta asing, begitupun sebaliknya. Terjadinya apresiasi maupun depresiasi rupiah terhadap mata uang asing akan berdampak pada utang luar negeri. Resiko kurs tidak saja memberatkan APBN tetapi juga perekonomian nasional.

#### **5.1.6. Pengaruh Harga Minyak Dunia dengan Keseimbangan Primer.**

Hipotesis awal menunjukkan bahwa harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan hipotesis awal ini sesuai dengan hasil hipotesis penelitian, diperoleh nilai t-hitung sebesar -1,8097 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,1079.

Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 1% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar  $(-1,8097) < t\text{-tabel } (-1,8595)$  pada

tingkat kepercayaan 90% maka  $H_0$  ditolak yang artinya harga minyak dunia secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer.

Dan dalam persamaan jangka panjang diperoleh nilai t-statistik sebesar -2,9154 dengan nilai probabilitas-t sebesar 0,0154. Berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan probabilitas t dengan alpha 5% diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar  $(-2,9154) < t\text{-tabel } (-1,8331)$  pada tingkat kepercayaan 95% maka  $H_0$  ditolak yang artinya harga minyak dunia secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer pada tahun 1998 hingga 2014 dengan tingkat kesalahan 5%.

Dalam beberapa tahun terakhir fluktuasi pergerakan harga minyak dunia mempengaruhi kondisi makroekonomi Indonesia, hal ini sangat mengkhawatirkan keadaan perekonomian Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia direspon oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri. Besarnya ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi dapat mempengaruhi kondisi anggaran subsidi BBM dalam APBN.

Dari hasil penelitian dalam jangka pendek harga minyak dunia secara statistik terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer dengan memiliki nilai koefisien  $D(LNHM)$  yang menunjukkan hasil signifikan sebesar - 4,66. Hal ini sesuai dengan hipotesis, pengaruh yang negatif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari harga minyak dunia akan menurunkan surplus keseimbangan primer sebesar 4,66% atau dengan kata lain akan meningkatkan defisit keseimbangan primer sebesar 4,66% dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang inelastis dengan perubahan

kenaikkan pada harga minyak dunia dalam jangka pendek akan mengakibatkan perubahan penurunan cukup besar pada keseimbangan primer.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Djunedi (2008) yang menjelaskan bahwa adanya kenaikan harga minyak dunia, pemerintah harus menyuntik anggaran yang begitu besar untuk menutupi kekurangan BBM dan dengan pengeluaran pemerintah pun semakin membengkak sehingga akan mengalami defisit pada APBN. Hal ini akan menimbulkan guncangan ekonomi turunan di berbagai sektor yang berhubungan dengan BBM. Harga minyak yang terus meningkat akan semakin menambah besarnya defisit APBN. Sehingga hal ini akan mengakibatkan surplus keseimbangan primer pun mengalami penurunan.

Dalam jangka panjang kenaikan harga minyak yang diikuti oleh meningkatnya permintaan BBM dalam negeri akan mengakibatkan terganggunya perekonomian makro Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan pemberian subsidi lebih besar untuk BBM. Defisit dalam APBN disebabkan juga oleh kenaikan harga minyak yang tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran minyak olahan dalam negeri, yang pada akhirnya menyebabkan keseimbangan primer mengalami defisit lebih besar dalam jangka panjang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan benar. Dalam jangka panjang harga minyak dunia secara statistik terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keseimbangan primer dengan memiliki nilai koefisien LN<sub>NHM</sub> yang menunjukkan hasil signifikan sebesar -5,60. Dengan pengaruh yang negatif ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% dari

harga minyak dunia akan menurunkan surplus keseimbangan primer sebesar 5,60% atau dengan kata lain akan meningkatkan keseimbangan primer menjadi defisit sebesar 5,60% dengan asumsi keseimbangan primer *ceteris paribus* dan menunjukkan kondisi yang inelastis dengan perubahan kecil pada harga minyak dunia akan mengakibatkan perubahan dalam jangka panjang cukup besar pada surplus keseimbangan primer.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri (2006) yang mengemukakan bahwa kenaikan harga minyak dunia telah membuat anggaran subsidi BBM menjadi semakin besar dan menambah defisit APBN, karena sebagian kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia hasil dari ekspor akibat belum mampunya produksi dalam negeri memenuhi konsumsi BBM yang besar. Impor minyak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri karena tingkat konsumsi minyak yang tinggi oleh masyarakat Indonesia begitu besar. Harga minyak dunia sangat menentukan jumlah realisasi anggaran subsidi BBM dalam APBN. Hal ini akan berpengaruh terhadap besarnya pemberian subsidi BBM dan berdampak pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang semakin membesar tanpa diimbangi penerimaan negara yang tinggi akan mengakibatkan keseimbangan primer menurun sepanjang tahun dan mengalami defisit yang berkepanjangan.

## **5.2. Uji F-Statistik**

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan atau tidak signifikannya

terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi F dengan cara membandingkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan F-tabelnya. Pengujian ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 95%. Pada model persamaan jangka panjang derajat kebebasan yang digunakan adalah  $Df_1 = k-1 = 6-1 = 5$  dan  $Df_2 = n-k = 17-6 = 11$  dengan nilai F tabel yang didapat dengan derajat kebebasan 5 dan 11 sebesar 3,2038.

Dan pada model persamaan jangka pendek dengan kebebasan yang digunakan  $Df_1 = k-1 = 7-1 = 6$  dan  $Df_2 = n-k = 16-7 = 9$  diperoleh nilai F- tabel sebesar 3,3737. Apabila F-hitung  $>$  F-tabel, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak. Hasil estimasi dalam jangka pendek diperoleh nilai F-statistik sebesar 5,7321 dan dalam persamaan jangka panjang diperoleh nilai F-statistik sebesar 13,7623. Dengan membandingkan nilai F-statistik dengan nilai F tabel diketahui bahwa F hitung  $>$  F tabel yang menunjukkan  $H_0$  ditolak pada kedua persamaan.

Hal ini mengartikan bahwa secara statistik pada tiap-tiap persamaan secara bersama-sama keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan primer.

## **B. Implikasi Ekonomi dan Kebijakan**

### **1. Penerimaan Negara**

Pengelolaan ekonomi Indonesia diperburuk oleh neraca keseimbangan primer APBN. Neraca keseimbangan primer adalah realisasi pendapatan negara dikurangi dengan realisasi belanja negara, diluar pembayaran bunga utang. Setiap tahun

penerimaan negara mengalami peningkatan dengan tren yang selalu positif, pada tahun 2013 penerimaan negara sebesar 1.438,1 triliun rupiah dimana pendapatan ini berasal dari dua sektor yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan dari pajak. Pendapatan yang berasal dari pajak sebesar 1.077,3 triliun rupiah dan bukan dari pajak sebesar 354,8 triliun rupiah. Berdasarkan ringkasan APBN, realisasi pendapatan tumbuh sebesar 10,3%. Meskipun pertumbuhan ini jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 21,6%. Jika dilihat dari pencapaian target, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2013 hanya mencapai 98,3% dari target, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 103,5% dari target.

Hal ini karena disebabkan oleh perlambatan ekonomi global yang berdampak pada lebih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan ini terjadi terutama berasal dari penurunan realisasi penerimaan pajak. Dalam upaya untuk mengendalikan keseimbangan primer pemerintah merencanakan dan mengoptimalkan pendapatan negara dan memperbaiki struktur belanja negara. Pengoptimalisasian penerimaan negara terutama dari sektor pajak akan mendorong meningkatkan surplus keseimbangan primer ke dalam posisi aman.

Namun kenyataan yang berlangsung saat ini pemerintah justru memberikan kebijakan insentif pajak untuk investor industri tambang, industri barang substitusi dari kebutuhan impor dan pajak untuk mobil murah ramah lingkungan. Adanya pemberian insentif untuk ekspor tambang mengakibatkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang terjadi adalah akan semakin banyaknya ekspor

tambang yang dihasilkan, hal ini akan menekan defisit keseimbangan primer yang terjadi karena penerimaan negara bertambah.

Dan dampak negatif yang ditimbulkan adalah hasil ekspor tambang dan produk tambang yang masih merupakan *raw material* atau barang mentah akan merugikan karena mengurangi keunggulan kompetitif dari nilai barang tersebut. Jika hasil tambang selain energi dapat diolah dalam negeri, maka akan meningkatkan nilai jual lebih barang tersebut dan mengekspor barang dengan nilai yang lebih tinggi. Sehingga seharusnya dapat menekan defisit keseimbangan primer dengan bertambahnya penerimaan negara bukan sebaliknya yang meningkatkan defisit keseimbangan primer.

Kebijakan pada pengurangan pajak sebagai insentif industri padat karya dan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah akan mengurangi pendapatan negara. Jika belanja negara diasumsikan tetap atau dalam keadaan *ceteris paribus* dengan kondisi pendapatan negara yang semakin menurun maka defisit keseimbangan primer akan semakin besar. Pada saat ini pendapatan negara sejak 17 tahun terakhir semakin meningkat naik secara signifikan. Hal ini menandakan adanya perkembangan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang menyokong banyak untuk anggaran negara. Pemerintah hendaknya mengambil kebijakan tepat dengan meminimalisasi kebocoran pajak yang selama ini cukup besar dan memaksimalkan potensi pendapatan pajak, karena kenyataannya penerimaan pajak masih belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi pajak yang dimiliki. Dan dalam jangka panjang penerimaan negara hendaknya tidak hanya bergantung kepada pendapatan pajak tetapi harus memaksimalkan

penerimaan dari BUMN dan sektor migas yang selama ini masih belum dikelola dengan efektif.

## **2. Pengeluaran Pemerintah**

Penyerapan anggaran pengeluaran negara yang tidak optimal tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Sebab inilah yang mengakibatkan keseimbangan primer mengalami defisit. Porsi belanja dalam APBN dengan penggunaan anggaran pembiayaan yang kurang tepat terutama untuk belanja pegawai dan subsidi BBM menggunakan porsi anggaran yang begitu besar, seharusnya porsi berlebih tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan yang lebih penting.

Keseimbangan primer merupakan total penerimaan dikurangi belanja dalam APBN yang tidak termasuk pembayaran bunga. Jika keseimbangan primer ini berada dalam kondisi defisit, maka penerimaan negara tidak bisa menutupi pengeluaran negara sehingga dalam membayar bunga utangnya saja negara sudah menggunakan pokok utang baru. Dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2012, Indonesia mengalami defisit pada keseimbangan primer yang diikuti dengan defisit pada APBN juga. Penyebab utama defisit neraca keseimbangan primer APBN adalah subsidi BBM yang semakin meningkat dan belanja rutin tidak selektif.

Adanya defisit keseimbangan primer pada APBN ini beresiko mengganggu kesinambungan fiskal, dimana kesinambungan fiskal ini merupakan suatu keadaan ideal yang harus dicapai pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kata lain menurut Stephen Marks (2004) Kesinambungan fiskal yaitu

dimana suatu kondisi dari pemerintah untuk menopang belanja lancar, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa mengancam solvabilitas pemerintah atau mengalami gagal bayar atas beberapa kewajibannya atau belanja dengan perjanjian. Kestinambungan fiskal yang terganggu oleh defisit keseimbangan primer ini diakibatkan oleh beban bunga utang yang setiap tahun selalu meningkat dan harus ditutup dengan penarikan pokok utang baru.

Dalam kenyataan jika dilihat pada struktur APBN porsi pengeluaran pemerintah lebih besar pada subsidi khususnya subsidi BBM. Berdasarkan ringkasan APBN, perkembangan pos belanja negara lebih besar kepada subsidi. Demi menjaga daya beli global pemerintah menganggarkan belanja subsidi yang cukup besar dalam APBN-P 2014. Realisasi subsidi secara total melampaui anggaran APBN-P sebesar 41,3%. Jumlah nominal subsidi tercatat dalam angka 403,035 triliun rupiah dimana sebelumnya hanya 364,4 triliun rupiah dengan kata lain meningkat 17,3% dibandingkan tahun 2013. Anggaran yang melampaui batas ini terjadi akibat tidak adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, dan harga minyak dunia yang terus meningkat.

Pada saat ini pengeluaran pemerintah begitu besar belanja APBN tidak disesuaikan dengan pendapatan. Seharusnya pengeluaran pemerintah ini harus disesuaikan dengan penerimaan negara. Jika penerimaan negara hanya mampu mencapai 1.635,379 triliun rupiah pada tahun 2014 maka pengeluaran tidak boleh mencapai 1.876,871 triliun di tahun yang sama. Anggaran subsidi BBM harus dikurangi. Dalam RAPBN 2014 tercatat defisit keseimbangan primer sebesar 106,041 triliun rupiah jumlah ini lebih besar dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Defisit keseimbangan primer itu sudah terjadi sejak 2012. Tetapi untuk sementara ini, dalam postur RAPBN 2014 pemerintah telah menyiapkan tambahan ruang fiskal (*fiscal space*) sebesar Rp21,9 triliun. Tambahan ini dinilai bisa mengurangi defisit dalam APBN, terutama defisit keseimbangan primer.

Defisit primer membuat ruang gerak fiskal pemerintah terbatas, sehingga mengurangi fleksibilitas pemerintah melakukan peralihan, terutama bila terjadi goncangan terhadap ekonomi, baik karena faktor internal maupun eksternal. Hendaknya pemerintah perlu melakukan kebijakan dengan merombak dan merestrukturisasi APBN, terutama dari sisi pengeluaran. Subsidi yang terlalu besar harus dipangkas, khususnya subsidi energi.

Kegiatan belanja pun harus difokuskan pada pos-pos yang dapat mendorong kenaikan produktivitas, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan menaikkan kualitas sumber daya manusia. Hanya dengan postur fiskal yang sehat dan efisien, kita bisa membendung defisit primer, di samping dapat menumbuhkan kepercayaan investor. Defisit primer APBN merupakan isyarat bahwa pemerintah perlu merestrukturisasi belanja APBN dan mengelola fiskal secara disiplin. Dengan menekan pengeluaran pemerintah tersebut juga diharapkan akan memperbaiki keseimbangan primer sehingga dapat menurunkan tekanan fiskal yang akan mendorong stabilitas perekonomian.

### **3. Utang Pemerintah**

Realisasi penerimaan negara tidak mampu lagi menutup belanja negara diluar pembayaran bunga dan cicilan utang. Untuk membayar utang pemerintah harus

membuat utang baru. Semakin besar keseimbangan primer yang disediakan oleh pemerintah, maka akan semakin besar penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Demikian sebaliknya apabila pertumbuhan PDB Indonesia juga mengalami peningkatan, maka besarnya rasio utang akan semakin turun. (LP2FE UGM, 2004).

Posisi utang pemerintah yang semakin meningkat dan memprihatinkan setiap tahunnya, menjadi masalah bagi pemerintah. Proporsi pembayaran utang yang begitu besar dalam APBN menjadi beban tersendiri bagi keuangan negara terlebih lagi efektivitas utang masih belum jelas. Sejak zaman orde baru, APBN selalu disusun berimbang tetapi kenyataannya anggaran setiap tahun selalu defisit. Dalam laporan APBN, beban pembiayaan utang pemerintah semakin meningkat kenaikan sejak 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan 54,90% dimana pada tahun 2010 jumlah utang pemerintah telah mencapai angka yang begitu besar yaitu sebesar 1.681,660 triliun rupiah dan pada tahun terakhir yaitu akhir 2014, utang pemerintah menunjukkan jumlah yang tidak lagi sedikit karena mencapai 2.604,88 triliun rupiah.

Kenaikan yang begitu cepat selama 5 tahun terakhir ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah yang begitu besar tidak tertutupi dengan penerimaan negara yang tidak sebanding. Akibatnya pemerintah harus mencari dana untuk menutupi kekurangan saat itu juga sedangkan utang lama belum terlunasi, dan pemerintah mengambil utang baru. Sebagian besar anggaran dalam APBN digunakan untuk membayar surat utang dan surat berharga negara lainnya. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi pemerintah yang membayar utang beserta bunga utang

menggunakan utang kembali yang diperoleh dari penerbitan surat utang negara. Kebijakan fiskal dapat dikatakan sustainable apabila tidak menyebabkan akumulasi utang pemerintah yang berlebihan (*excessive accumulation debt*) dan pemerintah dapat menjaga rasio utang terhadap level tertentu (Blanchard, 1990 dan Buiters, 1995).

Dalam muatan urgensi utang dipilih sebagai sumber pembiayaan karena derajat urgensi kebutuhan yang membutuhkan penyelesaian segera. Sedangkan muatan ekspansi berarti utang dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang melalui berbagai perhitungan teknis dan ekonomis dapat memberikan keuntungan (Basri, 2003).

Indonesia menjadi negara jeratan utang sejak kenaikan utang yang signifikan terjadi setelah krisis 1997-1998. Kenaikan utang digunakan untuk membiayai BLBI untuk menyelamatkan perbankan, maupun untuk merekapitalisasi dunia perbankan. Pada saat yang bersamaan, pelemahan rupiah juga membuat utang luar negeri dalam rupiah menjadi berlipat-lipat dalam waktu singkat. Akibat krisis moneter, utang pemerintah naik dari Rp 552,540 triliun tahun 1998 menjadi Rp 1.234 triliun tahun 2000. Tingkat utang pemerintah sempat relatif stabil pada periode 2000-2006. Namun, mulai tahun 2007, level utang mulai beranjak naik lagi. Kenaikan ini berkaitan dengan ekspansi kebijakan fiskal, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun untuk membiayai subsidi BBM di dalam negeri tahun 2008. Kemudian di tahun 2009, kenaikan lebih disebabkan stimulus fiskal yang diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selama periode 2014, pendapatan negara dan hibah adalah sebesar 1.635,379

triliun rupiah. Dengan belanja negara (diluar cicilan pokok dan bunga utang) sebesar 1.741,420 triliun rupiah, sehingga keseimbangan primer dalam APBN adalah defisit 106,041 triliun rupiah. Pembayaran bunga utang sebesar 93,8 triliun rupiah membuat keseimbangan umum APBN mengalami defisit sebesar 88,6 triliun rupiah. Hal tersebut tentunya mengakibatkan pemerintah tidak hanya gagal mengurangi stok utang, tetapi juga harus mencari pinjaman baru sebesar 88,6 triliun rupiah (pemerintah akhirnya mendapat sumber pembiayaan sebesar 112,6 triliun rupiah, sehingga terdapat kelebihan kas negara sebesar 24,0 triliun rupiah). Dengan demikian defisit keseimbangan umum sebesar 88,6 triliun rupiah membuat stok utang bertambah, sehingga negara ini akan menghadapi beban utang (cicilan pokok dan bunga) semakin besar dari tahun ke tahun yang tidak akan pernah . Meskipun defisit anggaran di bawah 2,5% terhadap PDB, akan tetap berbahaya terhadap keberlanjutan APBN dalam jangka panjang, karena negara ini akan menghadapi beban utang yang semakin besar dan tidak akan pernah terlunasi.

Tetapi hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Thomas J. Sargent dalam artikelnya *United States then, Europe Now* menyatakan *the ability to borrow today depends on expectations about future revenues* (2011) bahwa utang pada dasarnya tidak perlu dipersoalkan, sepanjang dapat menghasilkan pendapatan (*revenues*) yang cukup untuk membayar kembali utang tersebut.

Dalam jangka panjang adanya utang terus bertambah tidak baik bagi perekonomian, hendaknya pemerintah harus melakukan kebijakan dengan mengkaji ulang pengambilan utang baru untuk menutup utang yang lama karena

dengan pengambilan utang baru dapat mengakibatkan penambahan jumlah total utang dari tahun ke tahun yang akhirnya menyebabkan Indonesia masuk dalam perangkap utang (*debt-trap*), sehingga akan memberikan beban besar bagi APBN dalam jangka panjang.

#### **4. Inflasi**

Sejak tahun 1998 dimana di tahun tersebut merupakan tahunan terjadinya krisis moneter dunia yang berpengaruh ke seluruh negara termasuk Indonesia. Di tahun 1998, tingkat inflasi Indonesia merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah perekonomian Indonesia hingga tercatat sebesar 77,63%. Tingginya angka inflasi tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia hancur dan tidak stabil. Tetapi pasca kejadian tahun 1998, perekonomian Indonesia membaik dengan tumbuhnya ekonomi secara perlahan. Selama 3 periode pasca 1998, tingkat inflasi tahunan Indonesia berfluktuasi masih besar, rata-rata angka yang dihasilkan masih lebih dari 10. Sedangkan di tahun 2003-2004 angka inflasi secara berturut-turut sebesar 5,06% dan 6,4%. Angka ini masih jauh dibawah target pemerintah sebesar 6%. Kemudian di tahun 2005 inflasi mengalami kenaikan hingga 17,11% kenaikan ini disebabkan karena harga-harga yang diatur pemerintah, khususnya harga BBM.

Dalam waktu berikutnya fluktuasi inflasi stabil yang diikuti dengan meningkatnya permintaan domestik akibat pemulihan ekonomi, hal ini juga disebabkan karena kehati-hatian Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter dan kestabilan nilai rupiah. Sepanjang akhir tahun 2012 hingga awal 2015, inflasi

mengalami pergerakan yang meningkat dengan cepat dibanding tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2014 sebesar 8,36. Inflasi Indonesia yang masih dikategorikan sangat tinggi ini diakibatkan karena adanya tekanan bahan pangan yang salah satunya disebabkan terkendalanya pencapaian target produksi pangan akibat perubahan cuaca. Akibatnya pada musim-musim tertentu kondisi cuaca yang tidak dapat ditentukan mengakibatkan menurunnya pasokan beberapa komoditas pertanian seperti cabe, bawang, beras dan bahan pokok lain meningkat tajam karena tidak dapat menahan lonjakan harga komoditas tersebut. Fluktuasi harga di pasar komoditi nasional dan internasional serta tingginya harga minyak mentah dunia memang diperkirakan tetap memberikan tekanan terhadap inflasi dalam negeri.

Dalam jangka panjang inflasi akan mengakibatkan tidak efisiennya penggunaan keuangan negara dengan terjadinya defisit pada keseimbangan primer. Terjadinya inflasi memunculkan adanya kenaikan harga-harga dimana biaya pembangunan program juga akan meningkat sedangkan anggaran masih tetap sama. Hal ini mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas program sehingga untuk memaksimalkan program tersebut anggaran negara perlu direvisi. Maka, pemerintah dengan terpaksa harus mengeluarkan dana untuk menambah standar harga. Adanya peningkatan dalam pengeluaran yang dilakukan pemerintah akibat inflasi ini akan mengakibatkan surplus keseimbangan primer semakin menurun. Pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan fluktuasi dari nilai tukar, inflasi, dan harga minyak dunia dengan stimulus fiskal serta diperlukan adanya koordinasi yang erat antara penguasa fiskal dan moneter dalam menentukan instrumen dan sasaran kebijakan untuk mengatasi pengaruh gejolak ekonomi tersebut.

## 5. Nilai Tukar

Selama tahun 2001, nilai tukar rupiah mengalami kecenderungan melemah secara perlahan. Dimana pada tahun 2001 nilai tukar berada pada tingkat 10.400.

Kemudian berfluktuasi cenderung stabil secara bertahap empat tahun berikutnya mencapai angka 9.830 pada tahun 2005 yang diikuti dengan peningkatan inflasi yang sangat tinggi yaitu 17,11%. Selanjutnya nilai tukar stabil selama tiga tahun yang kemudian terdepresiasi lagi sebesar 10.950. Hal ini diakibatkan krisis global yang semakin dalam pada tahun 2008. Karena nilai tukar rupiah ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, akibat terjadinya krisis global di Eropa mengakibatkan terjadi likuiditas global sehingga mengakibatkan depresiasi terhadap rupiah. Sejak tahun 2009 hingga 2012, nilai tukar mengalami fluktuasi yang stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bank Indonesia dalam laporan perekonomian Indonesia (2012) hal ini dikarenakan terjaganya tingkat kepercayaan pelaku pasar dan stabilitas sistem keuangan dengan meminimalkan pelemahan nilai tukar yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengelolaan cadangan devisa yang ditempuh Bank Indonesia.

Kemudian pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang awal tahun 2013 hingga sekarang mengalami depresiasi kembali. Pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah ini dari pengaruh luar diakibatkan karena penurunan peringkat kredit beberapa negara kawasan Eropa yang mengkonfirmasi semakin dalamnya dampak krisis utang dan fiskal, masih rentannya pemulihan perekonomian China dan AS serta melemahnya pertumbuhan global. Sedangkan pengaruh dari dalam

negeri diakibatkan karena pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Di tengah krisis ekonomi global yang terjadi lagi mengakibatkan Indonesia dengan melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan selama 3 tahun terakhir mempengaruhi keadaan empat jenis defisit yaitu defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit necara pembayaran, dan defisit primer dalam APBN.

Bank Indonesia dan pemerintah harusnya melakukan harmonisasi kebijakan yang tepat sasaran dan fokus dengan tidak menyerahkan nilai tukar rupiah pada pasar dan pasrah dengan pasar uang global karena akan semakin menekan nilai tukar rupiah. Dan selain itu seharusnya pemerintah juga harus mengurangi impor, sehingga tidak terlalu bergantung pada mata uang Amerika karena transaksi impor dilakukan dalam dollar Amerika. Dimana Indonesia masih sangat bergantung pada bahan dasar impor yang mengharuskan pengusaha harus membeli bahan dasar sesuai kurs berlaku. Hal ini menyebabkan modal yang dikeluarkan menjadi meningkat, harga produk akan dijual dengan harga tinggi dan mengakibatkan produk buatan Indonesia di pasar ekspor maupun dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar.

## **6. Harga Minyak Dunia**

Adanya fluktuasi harga minyak dunia sejak tahun 2008 dimana merupakan angka tertinggi mempengaruhi naik turunnya pendapatan dan belanja pemerintah. Saat harga minyak naik dari US\$72,34/barel, menjadi US\$99,67/barel. Pendapatan pemerintah ikut naik dari 707,806 triliun rupiah menjadi 981,609 triliun rupiah. Tetapi keadaan ini diikuti dengan kenaikan

pengeluaran pemerintah karena naiknya harga minyak dunia yang mengakibatkan naiknya belanja pemerintah untuk minyak (BBM) dan ditambah lagi dengan naiknya subsidi untuk bahan energi. Pada akhirnya, kenaikan harga minyak akan menjadikan defisit APBN ikut meningkat.

Sawitri (2006) yang mengemukakan bahwa kenaikan harga minyak dunia telah membuat anggaran subsidi BBM menjadi semakin besar dan menambah defisit APBN, karena sebagian kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia hasil dari ekspor akibat belum mampunya produksi dalam negeri memenuhi konsumsi BBM yang besar. Impor minyak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri karena tingkat konsumsi minyak yang tinggi oleh masyarakat Indonesia begitu besar. Harga minyak dunia sangat menentukan jumlah realisasi anggaran subsidi BBM dalam APBN. Anggaran dalam APBN hendaknya tidak dipergunakan untuk membiayai subsidi BBM tetapi dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan agar dapat memberikan kontribusi secara positif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan menekan keseimbangan primer.

Kebijakan pemerintah yang tidak tepat dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia yaitu menaikkan harga BBM dalam negeri untuk menyelamatkan anggaran tetapi mengorbankan kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional. Saat ini pemerintah telah memberlakukan kebijakan liberalisasi harga BBM dimana kebijakan ini cenderung memberikan celah bagi pihak asing. Kebijakan ini bertentangan dan memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat.

Harusnya pemerintah perlu memperbaiki kebijakan dalam menaikkan harga BBM dalam mengadaptasi akibat adanya fluktuasi harga minyak dunia. Dan perlu melakukan tinjauan kembali yang terkait pengelolaan migas dan memberikan batasan terhadap pihak asing dalam pengelolaan migas.